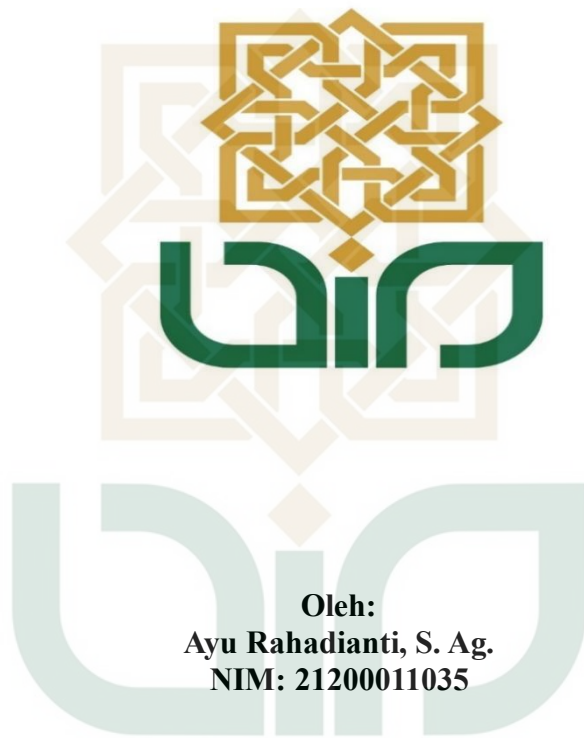


**ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN  
PADA LEMBAGA PELAYANAN TERPADU RUMAH  
HARAPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GARUT**



Oleh:  
**Ayu Rahadiani, S. Ag.**  
NIM: 21200011035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**TESIS**  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Master of Arts (M.A)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

**YOGYAKARTA**  
**2023**

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN  
PADA LEMBAGA PELAYANAN TERPADU RUMAH  
HARAPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GARUT**



Oleh:  
**Ayu Rahadiani, S. Ag.**  
**NIM: 21200011035**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Master of Arts (M.A)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

**YOGYAKARTA**  
**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-776/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat di Kabupaten Garut

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU RAHADIANI, S.Ag  
Nomor Induk Mahasiswa : 21200011035  
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 64e5fbc9b9004



Penguji II

Dr. Aziz Muslim, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 64e49a0281ed3



Penguji III

Hamad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 64e47ccc4f42a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 15 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 64e6b8b73740e

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Rahadiani, S.Ag.  
NIM : 21200011035  
Jenjang : Magister  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya ilmiah sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 - 08 - 2023

Saya yang menyatakan,



**Ayu Rahadiani, S.Ag**

NIM: 21200011035

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat Di Kabupaten Garut** Yang ditulis oleh:

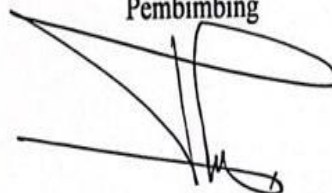
Nama : Ayu Rahadiani, S.Ag  
NIM : 21200011035  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A).

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 2 April 2023

Pembimbing



**Dr. Aziz Muslim, M.Pd.**

NIP. 19700528 1984031002



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada Lembaga Lapad Ruhama di Kabupaten Garut. Penelitian ini dinilai penting karena kebijakan pengentasan kemiskinan secara substansial dan ideal dinilai dapat mengurangi jumlah orang miskin dan mencapai perubahan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan upaya untuk mengonfirmasi keseluruhan data melalui observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang digagas oleh George C. Edward III dalam studi kebijakan publik. Penelitian ini memberikan suatu kesimpulan bahwa *pertama*, tindakan yang dilakukan Lapad Ruhama dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Garut yaitu mengintegrasikan informasi, data, dan layanan perlindungan sosial serta program penanggulangan kemiskinan; mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin; mencatat kepersertaan dan kebutuhan program; penanganan keluhan masyarakat miskin; serta pemutakhiran DT-PPFM agar data yang disajikan akurat, terkini, serta mencapai sasaran yang tepat.

*Kedua*, dalam mensinkronkan berbagai layanan perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, koordinasi Lapad Ruhama melalui aplikasi SIKS-SLRT, telepon seluler, dan pertemuan tatap muka. Keberadaan Lapad Ruhama memberikan akses mudah dan terpadu bagi masyarakat miskin mendapatkan layanan dan program penanggulangan kemiskinan. Dampaknya terlihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang menerima bantuan sosial dan layanan yang diberikan. Hal ini telah menghasilkan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2022. *Ketiga*, Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada lembaga Lapad Ruhama mencakup upaya untuk menghubungkan masyarakat miskin dengan berbagai layanan perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, maupun oleh sektor swasta. Keberhasilan implementasi kebijakan ada empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Semua indikator tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada lembaga Lapad Ruhama di Kabupaten Garut. Maka dari itu, hambatan dalam implementasi dapat dijadikan evaluasi oleh implementor kebijakan dalam upaya menurunkan kemiskinan di Kabupaten Garut.

**Kata Kunci:** Tindakan, Kinerja, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Lapad Ruhama

## ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of poverty alleviation policies at the Lapad Ruhama Institute in Garut Regency. This research is considered important because, substantially and ideally, poverty alleviation policies are considered to be able to reduce the number of poor people and achieve significant changes in poverty levels. This research is qualitative, with an attempt to confirm the entire data through observation, interviews, and document review, resulting in a descriptive analysis. The theory used in this study is the theory of policy implementation initiated by George C. Edward III in the study of public policy. This study provides a conclusion that first, the actions taken by Lapad Ruhama in alleviating poverty in Garut Regency are: integrating information, data, and social protection services and poverty reduction programs; identifying the grievances of the poor; recording participation and program needs; handling complaints of the poor; as well as updating DT-PPFM so that the data presented is accurate, up-to-date, and reaches the right target.

Second, in synchronizing various social protection services and poverty alleviation programs, Lapad Ruhama coordinates through the SIKS-SLRT application, cell phones, and face-to-face meetings. The existence of Lapad Ruhama provides easy and integrated access for the poor to poverty alleviation services and programs. The impact can be seen from the increase in the number of people receiving social assistance and services provided. This has resulted in a decrease in the number of poor people in Garut Regency in 2022. Third, the implementation of poverty alleviation policies at the Lapad Ruhama institution includes efforts to connect the poor with various social protection services and poverty reduction programs managed by the central, provincial, district, and village governments, as well as by the private sector. There are four indicators for successful policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. All of these indicators can influence the implementation of poverty alleviation policies at the Lapad Ruhama institution in Garut Regency. Therefore, obstacles in implementation can be used as an evaluation by policy implementers in an effort to reduce poverty in Garut Regency.

**Keywords:** Action, Performance, Policy Implementation, Poverty, Lapad Ruhama

## MOTTO

“Lakukanlah kebaikan sekecil apa pun karena engkau tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan memasukanmu ke surga.” – Imam Hasan Albasri





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk diri sendiri;

Untuk kedua orangtua: Ayah Drs. Sensen Komara (Alm) dan Ibu Titin Sumarni,  
S.ST, S.KM, Bdn, M.Kes;

Untuk paman tercinta: Bapak Gimgim Mulyana, S.Ag dan Bapak Ir. Deden  
Rahayu Setiana;

Untuk saudari kandung saya: Atu Setiati, S.Ag., Tami Sri Rahayu, S.Ked, Qori  
Alya Madani, Fata Ilahi, Danti Prabu Alfat Politika;

Untuk seluruh kawan seperjuangan IPKP angkatan 2021;



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan bantuan kemudahan dalam proses penelitian dan penulisan tesis yang berjudul: **Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat di Kabupaten Garut.** Sholawat dan dalam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan segala keberkahan.

Dengan banyaknya proses yang telah dijalani melalui bimbingan, pengarahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph. D., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Nina Mariani, SS., M.A., selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Sekertaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Dr. Aziz Muslim, M.Pd., selaku dosen pembimbing tesis.
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada program *Interdisciplinary Islamic Studies*. Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada orangtua dan seluruh keluarga besar yang telah melimpahkan dukungan, kasih sayang serta doa untuk kelancaran dalam proses pembelajaran ini.
9. Seluruh kawan di Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik Angkatan 2021 ganjil dan genap yang telah berjuang bersama-sama dalam proses pembelajaran jenjang magister dan penyelesaian karya ini.

Semoga segala ilmu yang telah penulis dapatkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk diri sendiri dan masyarakat luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Ayu Rahadiani, S.Ag.**

NIM: 21200011035

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>

A. Gambaran Umum Kabupaten Garut .....	32
1. Letak Geografis Kabupaten Garut .....	32
2. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut .....	34
3. Kondisi Masyarakat Kabupaten Garut .....	34
4. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Garut .....	38
B. Gambaran Umum Lembaga Lapad Ruhama .....	49
1. Tujuan Lapad Ruhama .....	49
2. Sasaran Lapad Ruhama .....	50
3. Struktur Lembaga Lapad Ruhama .....	51
4. Asas Lapad Ruhama .....	54
5. Integrasi Lapad Ruhama .....	56
6. Layanan Lapad Ruhama .....	58
<b>BAB III TINDAKAN DAN KINERJA LAPAD RUHAMA DALAM</b>	
<b>PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GARUT .....</b>	<b>60</b>
A. Tindakan Lapad Ruhama Dalam Mengentaskan Kemiskinan di	
Kabupaten Garut.....	60
1. Integrasi informasi, data, dan layanan pengentasan kemiskinan.....	61
2. Identifikasi keluhan masyarakat miskin.....	63
3. Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program.....	65
4. Penanganan keluhan masyarakat miskin .....	67
5. Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM).....	73

B. Kinerja Lapad Ruhama Dalam Mensinkronkan Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Garut.....	76
<b>BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN PADA LEMBAGA LAPAD RUHAMA DI KABUPATEN GARUT .....</b>	<b>83</b>
A. Analisis Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Lapad Ruhama di Kabupaten Garut.....	83
1. Komunikasi .....	83
2. Sumber daya .....	87
3. Disposisi .....	91
4. Struktur birokrasi .....	93
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Lapad Ruhama.....	96
1. Sosialisasi.....	96
2. Anggaran.....	97
3. Banyak masyarakat belum terdapat DTKS.....	98
4. <i>Back office</i> tidak berada dalam satu gedung .....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>122</b>



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 IPM Kabupaten Garut Tahun 2020-2022
- Tabel 2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Garut Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2019–2022
- Tabel 3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Garut Tahun 2018-2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Garut
- Gambar 2 Perkembangan Garis Kemiskinan 2018 – 2022  
(Rp/kapita/bulan)
- Gambar 3 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Tahun 2018 – 2022
- Gambar 4 Struktur Lembaga Lapad Ruhama
- Gambar 5 Alur Layanan dan Penanganan Keluhan Lapad Ruhama



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR SINGKATAN

AHH	: Angka Harapan Hidup
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BKD	: Badan Kepegawaian Daerah
BLT	: Bandung Langsung Tunai
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DT-PPFM	: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
LAPAD RUHAMA	: Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OVOP	: <i>One Village One Product</i>
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PIP	: Program Indonesia Pintar

PKH	: Program Keluarga Harapan
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PSKS	: Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUSKESOS	: Pusat Kesejahteraan Sosial
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SLRT	: Sistem Layanan Rujukan Terpadu
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>
SIKS-SLRT	: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Sistem Layanan Rujukan Terpadu
TKPKD	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah kompleks dan menimbulkan dampak yang menyebar ke seluruh tatanan masyarakat (*efek multiplier*). Tidak hanya individu yang terkena dampaknya, tetapi dampak ini dapat merasuki struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. kemiskinan juga merupakan akar dari berbagai masalah sosial lainnya termasuk meningkatnya potensi konflik sosial akibat perbedaan sosial yang tajam, kenaikan angka kriminalitas karena upaya bertahan hidup yang semakin sulit, dan peningkatan tingkat pengangguran yang mungkin mengancam stabilitas ekonomi suatu negara.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan kondisi yang menggambarkan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.<sup>2</sup> Kemiskinan bukan sekadar persoalan materi, tetapi juga melibatkan dampak yang mendalam pada kesejahteraan jiwa dan raga seseorang. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam memitigasi dampak kemiskinan ini melalui implementasi kebijakan yang berfokus pada

---

<sup>1</sup> Munawwaroh Sahib, "Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Makassar, Univeristas Islam Negeri Alauddin, 2016), 2.

<sup>2</sup> Novita Wulandari, Agussalim, dan Retno Fitriani, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan," *Development Policy and Management Review (DPMR)* 1, no. 2 (2021): 1–21.

inklusi sosial, kesetaraan pendidikan, perlindungan kesehatan yang merata, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Penanganan masalah kemiskinan memiliki peran penting untuk dapat segera mengatasinya, serta harus dilaksanakan secara konsisten. Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai elemen termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat.<sup>4</sup> Berdasarkan data BPS per Maret 2022 jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat berada di urutan kedua terbanyak nasional yaitu 4.070.980 jiwa atau 8,06% dari populasi penduduk Jawa Barat sebanyak 46 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat ini mengalami kenaikan 0.09% dari periode september 2021 lalu.<sup>5</sup>

Kemiskinan di Kabupaten selalu menjadi perhatian dan menjadi salah satu fokus utama pemerintah hingga saat ini. Kabupaten Garut merupakan daerah dengan angka kemiskinan terbanyak kedua di Provinsi Jawa Barat yaitu 281.400 jiwa. Setiap tahun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut selalu meningkat. Sebelumnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten

---

<sup>3</sup> Zamruddin Hasid, Akhmad Noor, dan Erwin Kurniawan, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022), 44.

<sup>4</sup> Rah Adi Fahmi Ginanjar, Sugeng Setyadi, dan Umayatu Suiroh, "Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 2 (2018): 227-248.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022," 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>.



Garut sudah berada di angka 9,98% atau 262.078 jiwa, namun kini naik menjadi 10,8%.<sup>6</sup>

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Garut memiliki akar penyebab yang kompleks dan multifaktor. Salah satu penyebab utama adalah kurang meratanya pembangunan dalam berbagai aspek penting seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kesenjangan ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang memadai di seluruh wilayah kabupaten. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, faktor infrastruktur juga memainkan peran penting dalam kesenjangan pembangunan di Kabupaten Garut. Kurangnya infrastruktur yang mendukung, seperti jalan, transportasi umum yang efisien, dan fasilitas publik yang memadai, dapat menghambat mobilitas sosial dan aksesibilitas terhadap layanan dasar.<sup>7</sup>

Dalam konteks global pandemi Covid-19, situasi kemiskinan di Kabupaten Garut semakin diperparah. Pandemi telah berdampak luas pada berbagai sektor ekonomi, mengakibatkan banyaknya kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, dan ketidakpastian ekonomi yang lebih besar. Banyak masyarakat yang sebelumnya berada di garis kemiskinan atau

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa), 2019-2021," 2021, <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/83/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.

<sup>7</sup> Andhika Lungguh Perceka, "Analisis Komparatif Angka Kemiskinan Sebagai Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 4, no. 2 (t.t.): 165–69.

rentan terhadap kemiskinan, kini mengalami peningkatan risiko kemiskinan akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini.<sup>8</sup>

Untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan pendekatan sistemik, terpadu, dan komprehensif dalam penanganannya.<sup>9</sup> Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut Kabupaten Garut menetapkan sebuah kebijakan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (Lapad Ruhama).<sup>10</sup>

Lapad Ruhama merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial untuk mempermudah masyarakat miskin dan rentan miskin dalam mengakses layanan perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa/Kelurahan, maupun sektor swasta. Lapad Ruhama memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Garut.

Lapad Ruhama mulai di implementasikan pada tahun 2019 sampai saat ini. Sejauh ini Lapad Ruhama telah berjalan lebih dari 4 tahun. Lapad Ruhama sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena tidak hanya

---

<sup>8</sup> Suryari Purnama dkk., “Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Yang Terkena Dampak Ekonomi Selama Covid-19 di Garut,” *Adi Pengabdian Kepada Masyarakat (ADIMAS)* 2, no. 1 (2021): 67–72.

<sup>9</sup> Irwan Abdu Nugraha, “Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 2 (2017): 19-29.

<sup>10</sup> BPK RI, “Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat,” diakses 25 November 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/>.

fokus kepada satu permasalahan kemiskinan saja. Lapad Ruhama ini mencakup kepada semua hal persoalan kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Penelitian tentang pengentasan kemiskinan sangat penting untuk dilakukan, karena masalah kemiskinan merupakan tantangan serius yang memiliki dampak luas dan kompleksitas yang mendalam terhadap individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan keseluruhan struktur sosial dan ekonomi suatu negara. Upaya untuk mengatasi kemiskinan ini sejalan dengan tujuan nomor satu dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu “tanpa kemiskinan”, yang menekankan pentingnya mengakhiri kemiskinan dalam berbagai bentuk dan di seluruh dunia. Pelaksanaan Lapad Ruhama diharapkan membantu tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat di Kabupaten Garut”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis merangkum beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Lapad Ruhama dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana kinerja Lapad Ruhama dalam mensinkronkan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut?

3. Bagaimana implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada lembaga Lapad Ruhama di Kabupaten Garut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merangkum beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Lapad Ruhama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana Lapad Ruhama dalam mensinkronkan program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut
3. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada Lembaga Lapad Ruhama di Kabupaten Garut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian ada manfaatnya masing-masing, begitu pula dengan penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang analisis kebijakan pengentasan kemiskinan pada Lembaga Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat di Kabupaten Garut, serta dapat dijadikan sebagai referensi rujukan akademis tentang kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

### 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan penting bagi ilmu kebijakan publik dengan menganalisis bagaimana lembaga Lapad Ruhama secara konkret berupaya untuk mensinkronkan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut. Penelitian ini dapat mengungkapkan tindakan, kinerja, hambatan, dan inovasi yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang kebijakan publik.

## E. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, sudah ada penelitian dan tulisan yang membahas tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan. Maka oleh karenanya, penulis melakukan riview terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap persoalan pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

*Pertama*, jurnal karya Yesi Triani, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri yang berjudul “*Analisis Pengetasan Kemiskinan di Kota*

*Palembang*” Tahun 2020. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program BLT, sekolah gratis, dan layanan berobat gratis di beberapa Provinsi di Indonesia. Meskipun demikian, program tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karena itu, strategi yang dianggap paling tepat dalam penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini fokus pada dua aspek utama, yaitu wilayah dan materi. Dalam lingkup wilayah, pemerintah Kota Palembang serta instansi pendukungnya yang terkait dalam kajian ini berperan penting, serta berbagai daerah yang menjadi kantong kemiskinan di sekitar Kota Palembang juga termasuk dalam wilayah yang menjadi perhatian.<sup>11</sup>

*Kedua*, jurnal karya Umar Reza Saputra yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Melalui Pengembangan Industri*” Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Kabupaten Brebes melakukan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan berbagai alternatif program dan kebijakan yang telah ada. Rekomendasi kebijakan ini didasarkan pada penilaian alternatif kebijakan. Berdasarkan penilaian alternatif tersebut, diusulkan untuk lebih mengoptimalkan Program *One*

---

<sup>11</sup> Yesi Triani, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri, “Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Palembang,” *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 159–78.



*Village One Product (OVOP)* agar dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan produk dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk miskin. Program OVOP mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan produk yang telah mereka buat dengan berbagai inovasi, sehingga dapat bersaing di pasar.<sup>12</sup>

*Ketiga*, jurnal karya Iskandar Ibrahim yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato*” Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan Program PKH di Kecamatan Dengilo telah mencapai sasaraannya dengan tepat, dan tujuan dari program ini berhasil tercapai dengan baik. Sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan PKH telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan telah menerima pelatihan langsung dari Kementerian Sosial RI terkait implementasi PKH. Para pendamping keluarga penerima manfaat juga memiliki karakteristik yang memungkinkan mereka untuk mandiri dan berperan sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan, serta memberikan motivasi kepada keluarga penerima manfaat. Komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam

---

<sup>12</sup> Umar Reza Saputra, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Melalui Pengembangan Industri,” *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2021): 22–36.

pelaksanaan PKH berjalan lancar, terbukti dari struktur organisasi dan pembagian tugas yang baik, serta adanya pertemuan formal setiap bulan.<sup>13</sup>

*Keempat*, jurnal karya Amelia Kurnia Fajri Dkk yang berjudul “*Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan*” Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Jatinegara telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya tepat sasaran. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH sehingga adanya salah sasaran dalam pemberian bantuan. Pemberian bantuan PKH diberikan kepada warga yang tidak semestinya menerima bantuan.<sup>14</sup>

*Kelima*, jurnal karya Muhammad Sulhan dan Totok Sasongko yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang)*” Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa di Kelurahan Kauman, terdapat total 560 warga miskin, tetapi tidak semuanya terdaftar sebagai pemegang kartu KIP dan KIS. Dalam pelaksanaan program KIP, masyarakat Kelurahan Kauman merasakan manfaatnya dalam menghilangkan hambatan ekonomi bagi siswa

---

<sup>13</sup> Iskandar Ibrahim, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato,” *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2022): 113–37.

<sup>14</sup> Amelia Kurnia Fajri dkk., “Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan,” *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2022): 158–70.

agar dapat berpartisipasi secara aktif di sekolah. Sedangkan dalam program KIS, dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Kauman adalah kesempatan rumah tangga untuk menerima berbagai program perlindungan sosial, seperti bantuan Raskin dan Kartu Penjamin Sosial (KPS). Namun, terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam program ini. Salah satunya adalah banyak masyarakat yang belum dapat mengakses KIP dan KPS dari pemerintah karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat pengetahuan masyarakat tentang bantuan pemerintah terkait KIP dan KPS juga masih terbatas.<sup>15</sup>

Dalam upaya mengisi celah penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang sebelumnya belum terungkap, khususnya terkait peran Lembaga Lapad Ruhama dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan menganalisis tindakan dan kinerja Lapad Ruhama dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III. Dengan demikian, hal ini pun menjadi *gap* yang dapat penulis tawarkan dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Muhammad Sulhan dan Totok Sasongko, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang)," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2017): 15–18.

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu perangkat yang diperlukan untuk menguraikan teori yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan peristiwa yang ada di dalam penelitian. Teori dalam sebuah penelitian berfungsi untuk menganalisis atau membedah hasil temuan yang ada di lapangan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang analisis kebijakan pengentasan kemiskinan pada Lembaga Lapad Ruhama di Kabupaten Garut, maka teori implementasi kebijakan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat melalui berbagai program atau inisiatif lainnya.<sup>16</sup> Kebijakan publik umumnya merujuk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya politik dalam mengatasi berbagai masalah dan isu yang muncul di masyarakat. Salah satu isu umum yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kemiskinan.

Kemiskinan tidak lagi dianggap hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi telah meluas hingga mencakup dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik.<sup>17</sup> Kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi yang dipengaruhi

---

<sup>16</sup> Sholih Muadi, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *Jurnal Riview politik* 6, no. 2 (2016): 195–224.

<sup>17</sup> Rintan Purnama Ayu Apriliani, "Pengentasan Kemiskinan di Desa Talok Melalui Pendidikan Non Formal Berbasis Anyaman Bambu dengan Metode Pembangunan Berkelanjutan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2011 Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia 2045," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 1 (2018): 31–46.

oleh berbagai faktor penyebab, yang biasa disebut multidimensional. Kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan penghasilan, tetapi juga melibatkan aspek yang lebih luas, seperti kerentanan individu atau kelompok dalam menghadapi risiko menjadi miskin, dan keterbatasan akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses penentuan kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan mereka.<sup>18</sup> Dengan memahami kemiskinan sebagai persoalan yang bersifat multidimensi, maka implikasinya adalah tidak ada satupun cara atau kebijakan tunggal yang dapat menanggulangi kemiskinan. Dengan kata lain pendekatan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bisa parsial, melainkan harus bersifat multidimensi dan komprehensif.<sup>19</sup>

Kebijakan yang dibuat dalam upaya pengentaskan kemiskinan dituangkan ke dalam sebuah Peraturan, kemudian merumuskan program-program pengentasan kemiskinan ataupun membentuk sebuah kelembagaan. Kebijakan publik yang dibuat dan diimplementasikan oleh negara diharapkan dapat berfungsi sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, perlu merancang pendekatan yang sesuai dengan karakteristik kemiskinan di setiap daerah. Hal ini karena karakteristik kemiskinan dapat berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, baik dari segi ekonomi, sosial, geografis,

---

<sup>18</sup> Jadmika Sufiadi, Irwan Noor, dan Suryadi, "Implementasi Program Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin," *Reformasi* 5, no. 1 (2015): 160–68.

<sup>19</sup> Deasy Soraya A Aminartha, "Analisis Kebijakan Anggaran Yang Berorientasi Pro Poor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap," *Bata Ilyas Educational Management Review* 3, no. 1 (2023): 12–19.

maupun budaya. Dengan memahami perbedaan karakteristik kemiskinan antar daerah, akan diperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang situasi kemiskinan yang sebenarnya.<sup>20</sup>

Segala kebijakan pemerintah tidak bermakna apabila tidak di implementasikan dalam masyarakat. Implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, serta untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan tanpa implementasi hanya akan menjadi dokumen yang tidak memiliki arti dalam kehidupan masyarakat. Implementasi merupakan proses untuk menyampaikan hasil dari kebijakan yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran, sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Keberhasilan tujuan kebijakan akan tercapai ketika hasil kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran, sehingga pada akhirnya, dampak kebijakan dapat terwujud dalam jangka panjang.<sup>21</sup>

George C. Edward III menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan tidak akan tercapai tanpa implementasi yang baik. Implementasi dilakukan berdasarkan instruksi yang sah dari kebijakan publik yang telah dirumuskan, dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat.<sup>22</sup> Teori

---

<sup>20</sup> Josef Papilaya, "Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan* 4, no. 1 (2020): 77–91.

<sup>21</sup> Thoriq Ramdani, "Pengelolaan Komunikasi Publik," *Jurnal Good Governance* 15, no. 1 (2019): 11–27.

<sup>22</sup> George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 1.



implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edward III memiliki empat variabel yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>23</sup>

#### 1. Komunikasi

Edward III yang dikutip oleh Riant Nugroho,<sup>24</sup> menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan merujuk pada proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, yang selanjutnya informasi tersebut akan disampaikan kepada kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait. Dalam komunikasi kebijakan, penting untuk memastikan kecepatan, ketepatan, dan konsistensi dalam penyampaian informasi kebijakan. Komunikasi ini diperlukan agar para pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan pemahaman dari pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengenai isi, tujuan, arah, dan target dari kebijakan yang diimplementasikan.<sup>25</sup> Komunikasi

---

<sup>23</sup> George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 10.

<sup>24</sup> Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Gramedia, 2012), 191.

<sup>25</sup> George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 17.

kebijakan melibatkan tiga indikator utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a. Transmisi

Transmisi adalah faktor utama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan. Penyaluran komunikasi yang efektif akan berdampak positif pada implementasi kebijakan. Kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam konteks ini mengacu pada kemampuan pelaksana kebijakan untuk menjelaskan dengan jelas tujuan dan maksud dari kebijakan yang telah dirumuskan. Penjelasan mengenai kebijakan publik tersebut ditujukan kepada masyarakat atau pihak lain yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Penting bahwa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak menimbulkan kebingungan.<sup>26</sup> Jika pesan komunikasi tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang salah atau bahkan bertentangan dengan makna asli dari pesan tersebut.

c. Konsistensi

---

<sup>26</sup> George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 154.

Konsistensi mengacu pada pentingnya implementasi kebijakan yang efektif melalui perintah yang konsisten dan jelas. Tingkat efektivitas implementasi kebijakan tergantung pada konsistensi dan kejelasan dari perintah pelaksananya. Implementasi kebijakan publik yang sudah dirumuskan harus sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, hasil dari kebijakan publik yang diimplementasikan akan sesuai dengan harapan dan tujuan dari pembuat kebijakan, serta dapat berjalan dengan efektif dan efisien.<sup>27</sup> Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.<sup>28</sup>

## 2. Sumber daya

Menurut Edward III yang dikutip oleh Leo Agustino,<sup>29</sup> bahwa Sumber daya merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan yang sukses. Ini berkaitan dengan ketrampilan dan kapabilitas para pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan kebijakan dengan efektif. Ketika para pelaksana kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasinya

---

<sup>27</sup> George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quartely Press, 1980), 142.

<sup>28</sup> Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 3.

<sup>29</sup> Leo Agustiono, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 158-159.

cenderung tidak berjalan dengan baik.<sup>30</sup> Beberapa indikator digunakan untuk mengukur sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan, di antaranya yaitu:

a. Staf atau pegawai

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh pegawai yang tidak cukup memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.<sup>31</sup> Hanya menambah jumlah pegawai saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah implementasi kebijakan, tetapi diperlukan staf yang memadai dengan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan tugas.

b. Informasi

Dalam pelaksanaan kebijakan, informasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, informasi yang berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui langkah-langkah yang harus diambil ketika menerima perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan

---

<sup>30</sup> George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quartely Press, 1980), 53.

<sup>31</sup> Syafri Arief, Jumadi, dan Abdullah, "Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar" *Prosiding Seminar Nasional: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmun Sosial Indonesia 2* (2016): 423–36.

dengan tingkat kompetensi dan kapabilitas para pelaksana dalam menjalankan kebijakan dengan baik.

c. Kewenangan

Pada umumnya, kewenangan harus memiliki sifat formal agar perintah dapat dijalankan secara efektif. Kewenangan berfungsi sebagai otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tanpa adanya kewenangan yang jelas, kekuatan para pelaksana dalam pandangan publik tidak akan diakui secara sah, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.

d. Peralatan

Sumberdaya peralatan adalah fasilitas yang digunakan untuk menjalankan operasional implementasi suatu kebijakan, termasuk gedung, tanah, dan sarana lainnya yang semuanya berperan penting dalam memberikan pelayanan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi atau Sikap

Disposisi mengacu pada kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Sikap para pelaksana yang bersedia menerima dan melaksanakan kebijakan tanpa paksaan merupakan kunci keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya

bergantung pada pengetahuan dan kemampuan para pelaku kebijakan untuk menjalankan tugasnya, tetapi juga tergantung pada disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.<sup>32</sup>

Aspek struktur organisasi meliputi dua hal berikut:

a. Pengangkatan birokrasi

Disposisi atau sikap para pelaksana dapat menjadi hambatan nyata dalam implementasi kebijakan jika personel tidak menjalankan kebijakan sesuai dengan arahan dari pejabat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses pengangkatan dan pemilihan para pelaksana kebijakan harus memastikan bahwa mereka memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu pendekatan yang dianjurkan untuk mengatasi permasalahan sikap para pelaksana kebijakan dengan mempengaruhi motivasi mereka melalui insentif. Karena pada dasarnya, orang bergerak berdasarkan kepentingan pribadi, manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan memberikan tambahan keuntungan atau kompensasi tertentu, hal ini dapat menjadi faktor pendorong yang mendorong para pelaksana untuk menjalankan perintah dengan baik. Tujuannya

---

<sup>32</sup> George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quartely Press, 1980), 89.

adalah untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Keterbatasan anggaran yang tersedia dapat menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat menjadi terbatas. Selain itu, keterbatasan insentif yang diberikan kepada para implementator juga merupakan penyebab utama dari kegagalan pelaksanaan program.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Meskipun sumber daya telah tersedia, para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman tentang tanggung jawab mereka, dan memiliki keinginan untuk melaksanakannya, namun implementasi kebijakan dapat menjadi kurang efektif jika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien. Jika struktur birokrasi tidak mendukung implementasi suatu kebijakan, hal ini dapat menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.<sup>33</sup> Menurut Edward III dalam Winarno,<sup>34</sup> terdapat dua

---

<sup>33</sup> George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 125.

<sup>34</sup> Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 150.



indikator struktur birokrasi yang dapat meningkatkan kinerja implementasi kebijakan menuju yang lebih baik, yaitu:

a. *Standard Operational Procedure (SOP)*

Salah satu elemen struktural dasar dalam sebuah organisasi adalah SOP. SOP merupakan serangkaian prosedur atau aktivitas rutin yang terencana, memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan penggunaan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga membentuk pedoman tindakan bagi pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga menciptakan fleksibilitas dan keseragaman dalam penerapan peraturan-peraturan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab dalam suatu bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan tanggung jawab berupa aktivitas, kegiatan, atau program kepada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan adanya fragmentasi struktur birokrasi, implementasi kebijakan dapat menjadi lebih efektif karena dijalankan oleh organisasi-organisasi yang

kompeten dan memiliki kapabilitas yang sesuai dengan tugasnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>35</sup> Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini disebabkan oleh adanya data yang dikumpulkan berupa penjelasan dan persepsi dari subjek penelitian. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik dari perilaku, motivasi tindakan secara holistik, persepsi, maupun deskripsi yang berbentuk kata-kata dan bahasa.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu dengan cara yang factual dan cermat.<sup>36</sup> Alasan peneliti memilih penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan keadaan

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 6.

<sup>36</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 7.

yang akan diamati di lapangan secara lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Manajer Lapad Ruhama, *Front Office* Lapad Ruhama, Supervisor Lapad Ruhama, Fasilitator Lapad Ruhama, serta beberapa masyarakat yang pernah menerima bantuan dari Lembaga Lapad Ruhama. Selain itu, data primer dalam penelitian ini yaitu dokumen pemerintahan. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Data sekunder penelitian ini didapatkan penulis melalui kajian kepustakaan (*library research*) seperti buku, artikel jurnal, data BPS, dan lain sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dengan tujuan untuk mengumpulkan banyak informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan

informan ataupun subjek penelitian.<sup>37</sup> Dalam hal ini, penulis berupaya untuk mewawancarai beberapa informan yang memiliki peran penting terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Lembaga Lapad Ruhama yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Manajer Lapad Ruhama, *Front Office* Lapad Ruhama, Supervisor Lapad Ruhama, Fasilitator Lapad Ruhama, serta beberapa masyarakat yang pernah menerima bantuan dari Lembaga Lapad Ruhama.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan melibatkan diri dalam proses kegiatan pemberian pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Lapad Ruhama kepada masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya guna mendukung penelitian yang dilakukan diantaranya surat lembar assessment, arsip foto kegiatan Lapad

---

<sup>37</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 10.

Ruhama, hasil rapat evaluasi tahunan Lapad Ruhama, catatan harian pengunjung, DTKS, data kasus tuntas dan belum tuntas yang ditangani oleh Lapad Ruhama.

#### 4. Analisis Data

Dalam penulisan ini, untuk mendapatkan analisis yang mendalam, informasi dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Setelah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan pemilahan-pemilahan untuk menemukan informasi yang sesuai dengan tema kajian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis, dikritisi, dan disandingkan dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Analisis data merupakan upaya sistematis untuk mencari dan menyusun catatan hasil yang diperoleh, dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang objek penelitian dan menyajikan temuan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga proses dalam melakukan analisis dan pengumpulan data, yaitu:<sup>38</sup>

##### a. Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data hasil penelitian, termasuk data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memudahkan pengolahan data penelitian. Setelah data terkumpul secara lengkap, peneliti melakukan pemilahan dan pengklasifikasian data yang relevan

---

<sup>38</sup> Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.

dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan reduksi data dengan menyederhanakan berbagai data yang telah diperoleh. Dalam proses reduksi data, data yang disederhanakan tersebut harus dapat mewakili keseluruhan data yang telah dikumpulkan.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data, peneliti akan memaparkan data yakni informasi yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, grafik, dan tabel guna memudahkan peneliti untuk melaksanakan penarikan kesimpulan. Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian secara rinci pada informan sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka berdasarkan data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu dalam penyajian data penulis memperdalam temuan dan menganalisis data dengan menggunakan teori implementasi kebijakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian ini, kesimpulan disajikan secara deskriptif dengan mengacu pada hasil analisis dan kajian penelitian. Kesimpulan diverifikasi dengan dukungan bukti yang kuat dan sesuai dengan

kondisi yang ditemukan di lapangan. Dalam proses ini penulis berupaya untuk mendeskripsikan secara mendetail hasil temuan dalam penelitian, sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah penelitian yang ada.

## 5. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi digunakan sebagai cara untuk mengatasi perbedaan kenyataan yang ada dalam konteks penelitian dengan mengumpulkan data dari berbagai pandangan tentang berbagai kejadian dan hubungan. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memverifikasi temuan-temuan mereka dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber, metode, atau teori yang berbeda.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah suatu teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan atau kredibilitas data dengan memeriksa informasi dari beberapa sumber data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, dan dianalisis secara menyeluruh, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang lebih kuat dari penelitian.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 332.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), 440.



Misalnya peneliti ingin mengumpulkan data tentang sosialisasi kepada masyarakat apakah sudah dilakukan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. Maka triangulasi bisa dilakukan dengan cara mewawancarai kepada manager, supervisor, dan fasilitator Lapad Ruhama. Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan dan mengategorikan data tersebut. Peneliti juga melakukan penelaahan terhadap pandangan yang sejalan dari beberapa sumber data tersebut. Dengan menggunakan triangulasi sumber, peneliti memverifikasi data dengan cara membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber lainnya. Dengan demikian, kesimpulan dapat dihasilkan dari data yang telah dianalisis secara holistik dari berbagai sumber oleh peneliti.

b. Triangulasi Metode

Dalam upaya memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi metode dengan mengadopsi lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sejalan..<sup>41</sup> Dengan mengaplikasikan triangulasi metode, peneliti melakukan pengecekan data dengan mengandalkan sumber yang sama, tetapi menggunakan metode yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), 440.

hasil pengamatan dari teknik-teknik yang berbeda menunjukkan perbedaan, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan hingga mencapai kejelasan dan kebenaran datanya. Tujuan dari triangulasi metode adalah untuk mencari kesesuaian data yang diperoleh dari berbagai pendekatan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bagian. Tujuan untuk mendeskripsikan keseluruhan isi tulisan pada setiap bab.

**BAB I PENDAHULUAN:** meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN:** meliputi gambaran umum Kabupaten Garut yang terdiri dari letak geografis, jumlah penduduk, kondisi masyarakat, dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Garut. Selain itu, pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Lembaga Lapad Ruhama yang terdiri dari tujuan, sasaran, struktur Lembaga, asas, integrasi, dan layanan Lapad Ruhama.

**BAB III TINDAKAN DAN KINERJA LAPAD RUHAMA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GARUT:** meliputi tindakan Lapad Ruhama dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten

Garut, yang terdiri dari integrasi informasi, data, dan layanan pengentasan kemiskinan; identifikasi keluhan masyarakat miskin; pencatatan kepersertaan dan kebutuhan program; penanganan keluhan masyarakat miskin; serta pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM). Selain itu, pada bab ini akan membahas mengenai kinerja Lapad Ruhama dalam mensinkronkan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut.

**BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN PADA LEMBAGA LAPAD RUHAMA DI KABUPATEN GARUT:** akan memaparkan terkait hasil temuan-temuan lapangan dengan analisis teori Implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu pada bab ini akan membahas terkait faktor penghambat implementasi kebijakan Lapad Ruhama.

**BAB V PENUTUP:** meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil temuan-temuan yang dipaparkan dari keseluruhan bab, dengan tujuan untuk menjawab seluruh rumusan masalah. Kemudian, penulis akan memaparkan saran untuk rekomendasi penelitian selanjutnya agar dapat lebih dieksplorasi dan menjadi temuan baru yang akan menjawab pelaksanaan kebijakan ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisa penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, *pertama*, tindakan yang dilakukan Lapad Ruhama dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Garut yaitu mengintegrasikan informasi, data, dan layanan pengentasan kemiskinan dalam satu tempat; mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin agar keluhan yang disampaikan mendapatkan solusi yang tepat dan responsif; pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program masyarakat miskin; melakukan penanganan keluhan bagi masyarakat miskin; serta pemutakhiran DT-PPFM untuk memastikan bahwa data yang disajikan akurat dan terkini, serta dapat mencapai sasaran yang tepat.

*Kedua*, dalam upaya mensinkronkan berbagai layanan perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, Lapad Ruhama memiliki sebuah sistem aplikasi bernama SIKS-SLRT. Koordinasi Lapad Ruhama melalui sistem aplikasi adalah pendekatan yang efektif dalam mengintegrasikan informasi, berbagi data, dan berkomunikasi secara real-time. Koordinasi Lapad Ruhama dengan berbagai SKPD bukan hanya melalui aplikasi atau telpon seluler saja, namun koordinasi ini dilakukan juga melalui pertemuan tatap muka secara rutin. Sebelum adanya Lapad Ruhama, pelaksanaan program dan pelayanan berjalan secara terpisah dan

tidak terintegrasi. Masyarakat miskin mengalami kesulitan mengakses bantuan kemiskinan karena hambatan administratif dan prosedural. Hadirnya Lapad Ruhama memberikan akses mudah dan terpadu bagi masyarakat miskin mendapatkan layanan dan program penanggulangan kemiskinan. Setelah beralih ke fase endemi, jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan dan bantuan sosial meningkat. Sehingga pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut.

*Ketiga*, implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada Lembaga Lapad Ruhama dapat diukur dari 4 dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara umum, proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada Lembaga Lapad Ruhama telah terlaksana cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses implementasi.

Dalam aspek komunikasi, sosialisasi tentang lembaga Lapad Ruhama dan Puskesmas sudah dilakukan namun belum optimal karena keterbatasan anggaran. Informasi yang disampaikan oleh pihak pelaksana kepada masyarakat telah disampaikan dengan jelas. Kebijakan yang telah diimplementasikan masih konsisten dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Komunikasi secara intensif terus dilakukan oleh pelaksana kebijakan, baik melalui pertemuan tatap muka ataupun melalui telpon seluler.

Dalam aspek sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan Lapad Ruhama di Kabupaten Garut sudah

memadai. Sumber daya manusia Lapad Ruhama tersebar di berbagai tingkatan dan telah mendapatkan bimbingan teknis dari Kementerian Sosial serta instansi terkait. Semua sumber daya manusia Lapad Ruhama kompeten dalam bidangnya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat miskin. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Lapad Ruhama dan Puskesmas sudah tergolong baik. Akan tetapi, terdapat kendala dalam fungsi aplikasi untuk menginput data penduduk miskin yang masih perlu diperbaiki. Sementara itu, sumber daya kewenangan yang diamanatkan dalam bentuk Peraturan Bupati memegang peranan sentral dalam mengatur pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam aspek disposisi, proses pengangkatan dan pemilihan sumber daya manusia Lapad Ruhama di Dinas Sosial merupakan wewenang BKD. Supervisi dipilih dari kalangan TKSK atau ASN tingkat Kecamatan. Pengangkatan fasilitator berasal dari masyarakat yang bertempat di setiap Kelurahan/Desa. Anggaran Lapad Ruhama lebih difokuskan pada operasional kegiatan dan pembayaran gaji/honor kepada sumber daya manusia. Sedangkan Anggaran pelayanan sudah melekat pada SKPD terkait. Insentif yang diberikan kepada fasilitator Lapad Ruhama masih belum memadai.

Dalam aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana Lapad Ruhama sudah jelas. Manager bertugas menghendel seluruh bawahannya agar pelayanan pada masyarakat dapat berjalan seperti yang ditetapkan sebelumnya. Supervisor bertugas mengawasi dan

membantu fasilitator dengan melakukan review pembaruan dan penambahan data penerima manfaat, serta meneruskannya kepada manajer. Fasilitator bertugas mendatangi rumah warga yang melakukan aduan. *Back office* dan *Front Office* bertugas mengelola dan memberitahu jawaban keluhan masyarakat miskin. Implementasi kebijakan Lapad Ruhama sudah dijalankan sesuai dengan SOP alur layanan keluhan yang dibuat oleh Kementerian Sosial.

Berdasarkan hasil temuan peneliti terdapat empat faktor hambatan dalam implementasi kebijakan Lapad Ruhama yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya anggaran, banyak masyarakat belum terdaptar DTKS, dan bagian *back office* yang tidak berada dalam satu gedung.

## **B. SARAN**

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan serta pertimbangan agar implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada Lembaga Lapad Ruhama di Kabupaten Garut dapat terlaksana dengan baik. Adapun saran yang penulis ajukan adalah penulis mendorong kepada seluruh pemangku kebijakan ataupun implementor Lapad Ruhama untuk meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi di tingkat Desa/Kelurahan disertai dengan dukungan biaya yang memadai, karena selama ini kegiatan sosialisasi hanya sampai pada tingkat kecamatan. Selain itu, memperbaiki aplikasi yang terdapat pada setiap tab fasilitator agar tidak mengalami sistem error ketika menginput data penduduk miskin.



Diperlukan peningkatan aktifitas fasilitator dan supervisor dalam memasukkan data masyarakat miskin. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial perlu memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusianya melalui insentif, karena insentif yang selama ini diberikan masih terbilang rendah.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua program dan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat keberhasilan program tersebut. Tujuannya adalah agar dapat mengatasi hambatan tersebut, sehingga bisa berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Dalam usaha menangani masalah kemiskinan, disarankan agar pemerintah mengembangkan kebijakan yang lebih fokus pada upaya meningkatkan pendapatan, peluang kerja, dan aspek-aspek lain yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini hanya mengeksplorasi terkait tindakan Lapad Ruhama dalam mengentaskan kemiskinan, kinerja Lapad Ruhama, serta implementasi kebijakan Lapad Ruhama. Sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengambil informan yang lebih luas dan menambah variabel penelitian sehingga dapat mengisi kekurangan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Agustiono, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Aminartha, Deasy Soraya A. “Analisis Kebijakan Anggaran Yang Berorientasi Pro Poor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap.” *Bata Ilyas Educational Management Review* 3, no. 1 (2023): 12–19.
- Apriliani, Rintan Purnama Ayu. “Pengentasan Kemiskinan di Desa Talok Melalui Pendidikan Non-Formal Berbasis Anyaman Bambu dengan Metode Pembangunan Berkelanjutan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2011 Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia 2045.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 1 (2018): 31–46.
- Arief, Syafri, Jumadi, dan Abdullah. “Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar.” *Prosiding Seminar Nasional: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmun Sosial Indonesia 2* (2016): 423–36.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- BPS Kabupaten Garut. *Kabupaten Garut Dalam Angka 2023*. Garut: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2023.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Fajri, Amelia Kurnia, Dinda Larasati, Sabillah Prescilla Alifkiah, dan Augustin Rina Herawati. “Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan.” *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2022): 158–70.
- Ginanjari, Rah Adi Fahmi, Sugeng Setyadi, dan Umayatu Suiroh. “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten.” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 2 (2018): 227–48.
- Hasid, Zamruddin, Akhmad Noor, dan Erwin Kurniawan. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022.
- Ibrahim, Iskandar. “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.” *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2022): 113–37.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT dan Puskesmas*. Jakarta, 2017.
- Khomsan, Ali, Arya Hadi Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, Hidayat Syarief, dan Dadang Sukandar. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Maipita, Indra. *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2013.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muadi, Sholih, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani. “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.” *Jurnal Riview politik* 6, no. 2 (2016): 195–224.
- Nugraha, Irwan Abdu. “Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemsikinan Kabupaten Sragen).” *Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 2 (2017): 19–29.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Papilaya, Josef. “Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan).” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan* 4, no. 1 (2020): 77–91.
- Perceka, Andhika Lungguh. “Analisis Komparatif Angka Kemiskinan Sebagai Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 4, no. 2 (t.t.): 165–69.
- Purnama, Suryari, Riya Widayanti, Primasatria Edastama, dan Aropria Ria Saulina Panjaitan. “Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Yang Terkena Dampak Ekonomi Selama Covid-19 di Garut.” *Adi Pengabdian Kepada Masyarakat (ADIMAS)* 2, no. 1 (2021): 67–72.
- Ramdani, Thoriq. “Pengelolaan Komunikasi Publik.” *Jurnal Good Governance* 15, no. 1 (2019): 11–27.
- Saputra, Umar Reza. “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Melalui Pengembangan Industri.” *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2021): 22–36.
- Sufiadi, Jadmika, Irwan Noor, dan Suryadi. “Implementasi Program Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin.” *Reformasi* 5, no. 1 (2015): 160–68.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.

- Sulhan, Muhammad, dan Totok Sasongko. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang)." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2017): 15–18.
- Triani, Yesi, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri. "Analisis Pengetasan Kemiskinan di Kota Palembang." *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 159–78.
- Triono, Tomi Agus, dan Reno Candra Sangaji. "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022." *Journal of Society Bridge* 1, no. 1 (2023): 59–67.
- Usman, Husaini. *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Wulandari, Novita, Agussalim, dan Retno Fitriani. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan." *Development Policy and Management Review (DPMR)* 1, no. 2 (2021): 1–21.

### Website

- Badan Pusat Statistik. "Indeks Pembangunan Manusia," 30 Juli 2023. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.
- . "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022," 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>.
- . "Kemiskinan dan Ketimpangan," 30 Juli 2023. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. "IPM Kabupaten Garut Menurut Dimensi Penyusunannya Pada Tahun 2020-2022," 30 Juli 2023. <https://garutkab.bps.go.id/indicator/26/37/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-.html>.
- . "Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa) (Jiwa), 2019-2020," 2023. <https://garutkab.bps.go.id/indicator/12/186/1/jumlah-penduduk-kabupaten-garut-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-jiwa-.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut Menurut Lapangan Usaha 2018-2022*. Garut: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. “Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota (Rupiah/Perkapita/Perbulan), 2020-2022,” 2023. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/411/1/garis-kemiskinan-menurut-kab-kota.html>.

———. “Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa), 2019-2021,” 2021. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/83/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.

BPK RI. “Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat.” Diakses 25 November 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/>.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut. “Letak Geografis,” 2023. <https://www.garutkab.go.id/page/letak-geografis>.

### **Tesis**

Sahib, Munawwaroh. “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.” Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

### **Peraturan Hukum**

Garut, Bupati. “Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat,” 2018.

### **Wawancara**

Ahmad. Wawancara Bersama Fasilitator, 20 Maret 2023.

Angga. Wawancara Bersama Supervisor Lapad Ruhama, 30 Maret 2023.

Dani. Wawancara Bersama Fasilitator lapad Ruhama, 3 Maret 2023.

Dodi. Wawancara Bersama Front Office Lapad Ruhama, 24 Februari 2023.

Rohman, Endang. Wawancara Bersama Fasilitator Lapad Ruhama, 27 Februari 2023.

Sekarmaji, Aji. Wawancara Bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, 22 Februari 2023.

Yaya, Abu. Wawancara Bersama Manajer Lapad Ruhama, 22 Februari 2023.